

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abrurrahman, H. (1979). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pengairan*. Alumni.
- Aksinudin, S. (2016) *Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bersertifikat Dihadapkan Dengan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan.
- Chandra, T. (2009). *Kepastian Hukum Sertifikat Kepemilikan Tanah Dihubungkan Dengan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Alumni.
- Effendie, B. (1993). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.* Konstitusi Press.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Djambatan.

- H.R.W, G. (1986). *Istilah Hukum Latin Indonesia; Alih Bahasa S. Adiwinata*.  
Intermasa.
- Hutagalung, A. S. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*.  
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
- I (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Kartasapoetra, G. (1986). *Masalah Pertanahan Di Indonesia*. Bina Aksara.
- Kusumaatmadja, M. (1976). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional:  
Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan  
Hukum Di Indonesia*. Binacipta.
- Limbong, B. (2012). *Konflik Pertanahan*. Margareta Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1988). *Materi Pokok Hukum dan Politik Agraria*. Karunika  
Universitas Terbuka.
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni, Mandar Maju.
- Nurdin, M. (2018). *Akar Konflik Petanahan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Positum.
- Parlindungan, A. P. (1990). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Alumni.
- Parlindungan, A. P. (1990). *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*. Mandar Maju.
- Parlindungan, A. P. (2009). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (2nd ed.)*. Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Bunga Rampai Hukum*. PT. Ichtiar Baru.

- Rahardjo, S. (2009). *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rasjidi, L. (1939). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosda Karya.
- Ruchiyat, E. (2004). *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Alumni.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Prenada Media.
- Santoso, U. (2011). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Prenada Media.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.
- Sarjita. (2005). *Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugu Jogja  
Pustaka.
- Soimin, S. (2001). *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika.
- Sumardjono, M. (2005). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*.  
Kompas Media Nusantara.
- Sumardjono, M. (2009). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*.  
Buku Kompas.
- Sutedi. A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Sutedi. A. (2008). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah  
Untuk Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus  
Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3028 K/Pdt/2012.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

### C. SUMBER HUKUM LAIN

Arafat, Y. (2015). *Hak Milik Atas Tanah: Pengaturan Hak Milik Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang*. Jurnal Rechts Vol. 4.

Chandra, H. (2017). *Kajian Mengenai Gugata Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*. Jurnal Privat Law Vol. 5.

Farhan, R. (2021). *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Dengan Hak Eigendom (Studi Kasus Sengketa Yang Melibatkan Ahli Waris Keluarga AM dan Pt. PJ)*. Indonesian Notary 3.

Eupho, F. (2009). *Pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia: Penyelesaian Sengketa Pertanahan*.

Hadi, I. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*. Jurnal Yuridis.

Haryanto, A. (2022). *Gerbang Masuk Ke Sekolah Di Las Ahli Waris, Ratusan Siswa SDN Buni Sari Tak Bisa Belajar*. Okezone Edukasi. <https://edukasi.okezone.com/read/2022/08/08/624/2643924/gerbang->

[masuk-ke-sekolah-dilas-ahli-waris-ratusan-siswa-sdn-bunisari-tak-bisa-belajar](#)

Kalo, S. (2007). *Aspek dan Implikasi Hukum Dalam Pendaftaran Tanah dan Penerbitan Sertipikat Hak-Hak Atas Tanah*. Makalah Universitas Sumatera Utara.

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Nugraha, R. (2022). *Sengketa Lahan, SD di Bandung Barat Disegel Ahli Waris*. Ayobandung.com. <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/amp/pr-794086503/sengeketa-lahan-sd-di-bandung-barat-disegel-ahli-waris>

Nurdin, M. (2018). *Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia*. Jurnal Hukum Positum Vol. 3.

Salam, S. (2018). *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*. Nurani Hukum Vol. 1.

Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Silviana, A. (2016). *Akibat Hukum Mendirikan Bangunan Tanpa Izin Di Atas Tanah Hak Milik Orang Lain (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012)*. Diponegoro Law Journal. Vol. 5.